

SIGNIFIKANSI SURAT KABAR KOMPAS DALAM PEMBERITAAN PERISTIWA REFORMASI 98

DEVI FEBRIYANTI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: devifebriyanti13@gmail.com

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada tahun 1998, di Indonesia telah terjadi peristiwa penting yang dinamakan dengan peristiwa Reformasi 98. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, pemerintah Orde Baru telah berkuasa hampir 32 tahun. Pemerintahan Orde Baru sering diwarnai dengan berbagai kasus penculikan dan juga pengkekangan terhadap kehidupan pers di tanah air. Setelah terjadinya peristiwa Reformasi 98, semua itu berubah. Masyarakat hidup dalam suatu kebebasan dimana masyarakat tidak perlu lagi khawatir ketika akan mengemukakan aspirasinya. Di sini terlihat bagaimana pentingnya peristiwa Reformasi bagi perubahan kehidupan politik dan pers di Indonesia. Melihat arti penting peristiwa Reformasi 98, penulis ingin mengetahui mengapa terjadi peristiwa Reformasi 98 dan juga bagaimana signifikansi surat kabar *Kompas* dalam memberitakan mengenai seputar peristiwa tersebut. Alasan pemilihan surat kabar ini ialah dikarenakan sepanjang pemerintahan Orde Baru, *Kompas* berhasil menguasai persuratkabaran nasional dan juga lebih cermat dalam mengungkap sisi kelemahan dari pemerintahan Orde Baru.

Untuk menjawab penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sejarah kritis. Tahap dalam menggunakan metode ini yaitu; 1) Tahap Heuristik (pengumpulan sumber berupa surat kabar yang memberitakan Peristiwa Reformasi 98, terutama surat kabar *Kompas*), 2) Setelah terkumpul semua sumber sejarah tadi, langkah selanjutnya ialah mengkritik terhadap sumber tadi, apakah isi dan juga waktu pembuatan sumber tersebut betul dari zamannya atau tidak, 3) Langkah ketiga adalah interpretasi, 4) Langkah terakhir adalah tahap penulisan (historiografi). Dari penelitian ini dapat diketahui hasilnya yaitu *Kompas* memiliki keunggulan dibandingkan dengan surat kabar lainnya dalam memberitakan mengenai serangkaian peristiwa Reformasi 98. *Kompas* lebih jeli dalam mengungkap sisi-sisi kelemahan pemerintah Orde Baru dan juga menjadi surat kabar yang memuat berita-berita penting yang tidak banyak dimuat pada surat kabar lainnya. Berita-berita tersebut diantaranya ialah sikap orang-orang dekat Soeharto menjelang kejatuhannya, jawaban dari reaksi masyarakat mengenai Pro-Kontra mundurnya Presiden Soeharto, dan juga Perubahan bidang pemerintahan, politik, dan pers setelah Orde Baru lengser.

Kata Kunci: Reformasi, Kompas, Signifikansi

Abstract

In a 1998, in Indonesia has been happen the significance incident which called 98 Reform. This incident also marks the end of New Order Government. The New Order Government has been rule almost 32 years. New Order government often colored with various kidnapping cases and also curbs on local press. After the Reformation 98 incident, those all changes. People life in freedom which they aren't to worry about expressing their aspirations anymore. Here we see how important of 98 reform incident to change of political life and Indonesian press. Seeing the importance incident of Reform 98, the writer wanted to know why the Reform 98 incident is happen and also how significance the Kompas newspaper in reporting that incident. The reason for select Kompas as the object is because along the New Order Government Kompas had been controlled the national press and also more careful in exposing the weaknesses of the New Order government.

To answer this research, the writer will use the critical history method with the steps : 1) Heuristic (collecting all of resources who reporting the Reform incident, especially the Kompas newspaper, 2) after all of the source collected, the next step is to criticize those sources, is the content an the time to product that is original, 3) the third step is interpretation, 4) the last step is a writing step (Historiography).

The results from this research can be know that Kompas has an advantages over the other newspaper who report Reform 98 incident. Kompas is more careful in exposing the New Order government weakness and also had been the newspaper which contains important news that is not heavily loaded in other newspapers. Their news are contains the close people attitude of the Soeharto before his fall, the answer of the public reaction regarding Pro and Cons of the

President Soeharto resignation, and also the changes in a government, politics, and press after the fall of The New Order.

Keywords: *Reformation, Kompas, Significance*

PENDAHULUAN

Peristiwa Reformasi 98 dianggap sebagai salah satu peristiwa penting di Indonesia. Peristiwa ini dianggap penting karena memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak dari peristiwa tersebut diantaranya ialah setelah adanya peristiwa Reformasi 98, setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Setelah adanya peristiwa Reformasi 98, semua orang diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik, berserikat dan berkumpul. Sebelumnya pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, jumlah partai dibatasi hanya menjadi 3 partai saja (PDI, PPP, GOLKAR). Kegiatan berserikat serta berkumpul masa itu juga sangat dibatasi.

Selain hal di atas, setelah terjadi Reformasi kehidupan pers juga mengalami perubahan. Pers dapat menjalankan fungsinya kembali sebagai alat pengontrol sosial. Sebaliknya pada saat masa pemerintahan Orde Baru, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasi mereka secara leluasa kepada pemerintah dan kehidupan pers selalu diawasi. Usaha pemerintah dalam mengawasi kehidupan pers ialah dengan menerapkan adanya SIUPP. Dengan menerapkan adanya SIUPP, pemerintah dapat mengontrol kehidupan pers.

Secara keseluruhan, adanya perubahan terutama dalam bidang politik dan pers saat ini tidak dapat terlepas dari adanya peristiwa reformasi 98. Setelah adanya peristiwa tersebut, kehidupan politik dan pers cenderung berubah. Pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial seperti bagaimana mestinya. Kehidupan politik diberikan cukup kebebasan. Pada saat Presiden Habibie memerintah, siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan partai politik asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sebenarnya terdapat beberapa surat kabar yang memberikan mengenai peristiwa Reformasi 98, diantaranya surat kabar *Kompas*, *Jawa Pos*, *Suara Karya*, dan *Merdeka*. Dari pemberitaan semua surat kabar tadi, penulis tertarik pada pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar *Kompas*. Alasan ketertarikan pada surat kabar *Kompas* ialah dikarenakan surat kabar ini memiliki kejelian terhadap aspek politik Indonesia menjelang jatuhnya pemerintahan Soeharto. Menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, surat kabar ini dengan cermat memberitakan mengenai sikap orang-orang terdekat Soeharto yang mulai meninggalkan dirinya menjelang masa akhir pemerintahannya. Selain itu, surat kabar ini juga memberitakan bagaimana reaksi masyarakat menanggapi mundurnya Presiden Soeharto dan juga memberitakan mengenai perubahan-perubahan bidang pemerintahan, politik, dan pers setelah terjadinya

peristiwa Reformasi 98. Sebelumnya, surat kabar *Kompas* juga merupakan surat kabar yang cukup jeli dalam mengungkap bobroknya sistem pemerintahan Orde Baru dan siapa yang harus bertanggungjawab atas semua itu.

Melihat betapa pentingnya peristiwa Reformasi 98 seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dan ketertarikan penulis terhadap setiap pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar *Kompas* maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Sinifikasi Surat Kabar Kompas Dalam Pemberitaan Peristiwa reformasi 98*. Pentingnya dari penelitian ini ialah untuk mengungkapkan bagaimana surat kabar *Kompas* dibandingkan dengan surat kabar lainnya dalam memberitakan mengenai peristiwa menjelang jatuhnya Soeharto dan juga setelahnya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini yaitu :

1. Mengapa terjadi peristiwa Reformasi 98?
2. Bagaimana pentingnya peristiwa Reformasi 98 sehingga perlu untuk diberitakan?
3. Bagaimana signifikansi surat kabar *Kompas* terhadap surat kabar lainnya mengenai pemberitaan peristiwa Reformasi 98?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Reformasi 98 dan juga bertujuan untuk mengetahui signifikansi surat kabar *Kompas* dalam memberitakan Peristiwa reformasi 98, jika dibandingkan dengan surat kabar lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode historis atau metode sejarah. Louis Gottschalk berpendapat bahwa metode sejarah merupakan suatu proses pengujian, dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau secara kritis. Hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau berdasarkan data atau fakta yang diperoleh lewat proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah).¹ Terdapat beberapa tahapan pada penelitian sejarah yaitu; 1) Heuristik (pengumpulan sumber), 2) Kritik sumber, 3) Interpretasi atau penafsiran, 4) Historiografi atau penulisan.

Pada penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan oleh penulis ialah Heuristik atau tahap

¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, 1981, hlm. 3.

mengumpulkan sumber-sumber penelitian. Dari tahap ini, penulis berhasil mengumpulkan sumber penelitian berupa surat kabar yang terbit pada bulan Mei 1998, serta buku-buku pendukung penelitian ini.

a. Sumber Primer

Penulis telah berhasil mengumpulkan surat kabar yang memberitakan mengenai hal-hal yang terkait dengan peristiwa Reformasi 98. Surat kabar tersebut diantaranya ialah surat kabar *Kompas* bulan Mei 1998 (didapatkan dari Monumen Pers Nasional, yang bertempat di Solo), Surat Kabar *Suara Karya* dan *Merdeka* bulan Mei 1998 (didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang bertempat di Jakarta) dan surat kabar *Jawa Pos* (didapatkan dari Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya).

b. Sumber Sekunder

Penulis juga berhasil mengumpulkan buku-buku yang dapat mendukung penelitian ini, diantaranya ialah *Sejarah Nasional Indonesia VI, Politik Huru-Hara Mei 1998* karangan Fadli Zon, *Kerusuhan Mei 1998* karangan Ester Indahyani Jusuf, dkk, *Penakluk Rezim Orde Baru* karangan Muridan S. Widjojo, *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Suharto* karangan James Luhulima, *Pers Orde Baru* karangan David T. Hill. Buku-buku tersebut didapat dari perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, perpustakaan Monumen Pers Nasional dan PNRI.

Setelah melakukan tahap pengumpulan sumber maka, prosedur penelitian selanjutnya ialah tahap kritik sumber. Sumber-sumber yang telah ditemukan tadi kemudian di kritik. Pada penelitian ini dilakukan kritik intern terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan tadi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber berdasarkan dengan isi sumber tersebut. setelah dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut, langkah selanjutnya ialah dilakukan interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini, penulis mencari hubungan antar fakta yang telah ditemukan serta kemudian menafsirkannya. Setelah diinterpretasi, maka langkah terakhir dalam penelitian ini ialah *tahap* penulisan atau Hitoriografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Terjadinya Reformasi 98

Kemenangan Golkar atas pemilu tahun 1997 telah membawa presiden Soeharto kembali memimpin sebagai presiden selanjutnya. Golkar berhasil memperoleh suara sejumlah 684.187.907 (74,5

persen).² Presiden Soeharto sangat puas dengan hasil Pemilu tahun 1997. Hal ini diberitakan dalam surat kabar *Kompas*, 30 Mei 1997 dengan judul berita *Presiden Suharto Puas*. Berikut cuplikan beritanya :

Usai menyaksikan hasil perolehan suara sementara dan pelaksanaan pemungutan suara melalui layar monitor, Presiden Suharto merasa puas. Kepala Negara meminta semua pihak terkait melanjutkan upaya perhitungan suara. Hal itu harus dilakukan sesuai peraturan, serta tidak berlebihan.³

Sebagian masyarakat kecewa terhadap hasil Pemilu tahun 1997. Pada saat pengumuman hasil Pemilu, sempat terjadi adanya kerusuhan yaitu pembakaran gedung-gedung pemerintah dan kantor-kantor Golkar serta penghancuran kotak suara di Madura. Hal ini dilakukan oleh massa dari pendukung PPP yang kalah dalam pemilu tersebut.⁴

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada Pemilu 1997 dikarenakan masyarakat curiga akan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah di perparah lagi dengan adanya pengumuman nama-nama kabinet, dimana terdapat nama-nama orang-orang terdekat Soeharto seperti Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dan juga Mohammad Hasan yang menjadi menteri pada kabinet baru tersebut. Masyarakat sangat kesal terhadap pemerintah saat itu.

Setelah adanya Pemilu tahun 1997, Indonesia dikagetkan dengan terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia. Krisis moneter yang terjadi saat itu telah membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin ambruk. Sebelumnya, krisis tersebut telah terjadi di Thailand yang pada akhirnya meluas ke Indonesia.

Pada bulan Desember 1997, turunnya nilai mata uang rupiah semakin tajam hingga menembus angka Rp. 5000. Tidak sampai pada angka itu saja, bahkan nilai mata uang rupiah terus mengalami penurunan tajam hingga Rp. 17.000/US \$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini mengakibatkan hancunya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan modern di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya PHK secara besar-besaran.⁵

Turunnya nilai rupiah terhadap dollar AS juga bersamaan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya. Pada saat yang bersamaan, kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok misalnya beras mulai menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Musim kemarau yang panjang dan

²Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 663.

³ *Kompas*, 30 Mei 1997.

⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 63.

⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 666.

pengaruh *El Nino* telah membuat banyak panen pada tahun 1997 gagal total (*puso*).⁶

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengundang IMF untuk membantu mengatasi krisis moneter yang terjadi Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berharap besar pada bantuan IMF untuk mengatasi krisis moneter yang saat itu terjadi. Melemahnya nilai rupiah tersebut menyebabkan semakin banyaknya perusahaan gulung tikar dan mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran. Menurut laporan bidang ketenagakerjaan, krisis moneter memiliki dampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia masa itu.

Berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja dapat diketahui bahwa, pada tahun 1997 s/d. Mei 1998 telah terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya yaitu; 1) likuidasi dan pembekuan bank sejumlah 23 bank yang berdampak pada pemberhentian 12.056 pekerja, 2) adanya 903 perusahaan yang telah melaporkan PHK terhadap sekitar 171.453 orang, 3) Adanya proses penggabungan usaha sektor perbankan dengan jumlah pekerja sekitar 76.947 orang.⁷

Kedatangan IMF ke Indonesia ternyata tidak memberikan perubahan signifikan terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Kedatangan IMF justru membawa Indonesia semakin terbenam dalam krisis yang lebih parah. Hal ini dikarenakan bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh IMF memiliki ketentuan-ketentuan yang mengharuskan Indonesia menaati apapun yang diperintahkan oleh IMF. Pemerintah Indonesia yang masa itu sedang mengalami keterpurukan ekonomi, akhirnya terpaksa harus menaikkan harga BBM dan TDL.

Atas saran dari IMF, tanggal 4 Mei 1998, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini tentunya melalui pertimbangan matang dari pemerintah. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM dimuat dalam surat kabar *Kompas* dengan judul berita *Harga Pokok BBM Tergantung Minyak Mentah dan Kurs Dollar AS*, berikut beritanya :

Harga Pokok bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan dalam negeri sangat tergantung pada harga minyak mentah (*crude oil*) Internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Semakin tinggi harga minyak mentah dan nilai rupiah terhadap dollar AS melemah, maka harga pokok BBM tersebut semakin besar. Akibatnya, apabila harga BBM dipertahankan dalam tingkat yang sekarang, pemerintah harus mengeluarkan subsidi

yang sangat besar untuk mengganti kerugian Pertamina.⁸

Tanggal 4 Mei 1998, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut juga diiringi dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Menaikkan harga BBM merupakan salah satu langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk segera dapat mencairkan bantuan pinjaman IMF selanjutnya. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM, bantuan IMF pun cair pada tanggal 5 Mei 1998.

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ternyata menuai beragam reaksi baik dari anggota DPR, mahasiswa, maupun masyarakat. Anggota DPR menolak adanya kenaikan harga BBM tersebut. Penolakan anggota DPR ini dimuat dalam surat kabar *Kompas* tanggal 5 Mei 1998. Inti dari beritanya ialah bahwa, anggota DPR tetap menolak keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik tersebut dinilai secara sepihak dan mengabaikan fungsi serta peran DPR.⁹

Selain anggota DPR, mahasiswa juga turut serta menolak adanya kebijakan pemerintah tersebut. Reaksi mahasiswa atas kenaikan harga BBM diwujudkan dalam bentuk aksi keprihatinan yaitu berupa demonstrasi kepada pemerintah. Aksi demonstrasi tersebut dimuat dalam beberapa harian surat kabar, salah satunya ialah *Kompas*. Berikut adalah cuplikan isi beritanya.

Mahasiswa diberbagai kota hari Selasa (5/5) mengadakan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Para mahasiswa, mulai dari Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Jember, Surabaya, Malang, Ujungpandang, sampai Bali, mengadakan aksi jalan kaki (*long march*), menggelar spanduk dan poster sambil meneriakkan yel-yel yang intinya menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.¹⁰

Aksi mahasiswa tersebut semakin lama semakin intensif. Tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti juga turut serta melakukan aksi keprihatinan bersama dengan *civitas academica* universitas Trisakti. Sesuai mahasiswa melakukan aksi keprihatinan tersebut, tiba-tiba terjadi suatu insiden penembakan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan terbunuhnya 4 orang mahasiswa Trisakti. Mahasiswa Trisakti yang meninggal tersebut diantaranya ialah Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, Heri Hartanto dan Hafidhin Alifidin.

Peristiwa Trisakti diduga sebagai pemicu awal terjadinya kerusuhan yang melanda Jakarta saat itu. Peristiwa kerusuhan pertama kali terjadi di wilayah

⁶ Ester Indahyani Jusuf, Hotma Timbul, Olisias Gultom, dan Sondang Frishka, *op. cit.* hlm. 17.

⁷ Laporan Bidang Ketenagakerjaan, Mei 1998, hlm. 3.

⁸ *Kompas*, 1 Mei 1998.

⁹ *Kompas*, 5 Mei 1998.

¹⁰ *Kompas*, 6 Mei 1998.

Jakarta Barat, dekat dengan kampus Trisakti, Grogol. Massa melampiaskan kemarahannya dengan membakar pom bensin disekitar daerah tersebut. Peristiwa kerusakan inilah yang kemudian menjadi awal kerusakan-kerusakan yang lainnya.¹¹

Pada saat itu, banyak media massa yang memberitakan mengenai peristiwa kerusakan di Jakarta tersebut. Tanggal 14 Mei 1998, Surat kabar *Kompas* memberitakan bahwa aksi kerusakan yang terjadi di Jakarta berawal dari sekitar kampus Trisakti yaitu jalan Mogot, Jalan Kyai Tapa, Jalan S. Parman. Menjelang sore hari aksi perusakan dan pembakaran meluas ke wilayah Bendungan Hilir, Kedoya, Jembatan Besi, Bandengan Selatan, Tubagus Angke, Semanan, Kosambi. Aksi kerusakan tersebut juga diduga dipicu oleh adanya penembakan terhadap mahasiswa Trisakti.¹²

Aksi kerusakan yang terjadi sejak 13 Mei 1998, berjalan terus hingga tanggal 16 Mei 1998. Memasuki hari kedua, aksi tersebut diwarnai dengan perusakan, pembakaran, penjarahan dan perampokan di sentra-sentra perdagangan diseluruh wilayah Jakarta. Langit Jakarta diselimuti kabut hitam akibat pembakaran ratusan gedung, pasar, toko, mobil, dan motor. Situasi kembali

Aksi kerusakan yang terjadi di Jakarta juga sempat diwarnai dengan provokasi anti masyarakat Tionghoa telah terjadi. Suksesnya kehidupan ekonomi masyarakat Tionghoa, menjadikan masyarakat pribumi mengalami kecemburuan sosial dan menjadikan sasaran utama dari kerusakan ini adalah orang-orang minoritas termasuk Tionghoa. Selain aksi penjarahan, massa juga melakukan aksi pelecehan seksual terutama dengan sasaran terhadap perempuan-perempuan keturunan Tionghoa. Hal ini tampak dari adanya lokasi-lokasi pengrusakan-pembakaran dan lokasi perkosaan-pelecehan seksual di Jakarta yang menunjukkan bahwa lokasi pelecehan seksual terbanyak yaitu di daerah Jakarta Utara dan Barat dimana didominasi oleh orang-orang Tionghoa.

Peristiwa kerusakan yang terjadi di Jakarta telah mengakibatkan banyaknya jumlah korban jiwa, dan kerugian materiil. Berdasarkan dari laporan TGPF, jumlah korban yang meninggal dunia dari data Tim relawan ialah sebanyak 1.190 orang tewas terbakar, 27 orang terkena senjata dan 91 orang luka-luka. Data dari Polda menunjukkan sejumlah 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat. Data dari Kodam 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka. Data dari pemda DKI korban meninggal dunia 288, dan luka-luka 101.¹³

Kerugian materiil dari adanya peristiwa kerusakan ini cukup besar. Selain pengrusakan terhadap tempat-tempat umum, massa juga merusak

rumah penduduk maupun berbagai macam kendaraan. Pemda DKI Jakarta berusaha mendata jumlah total bangunan, kendaraan, maupun fasilitas umum sebagai akibat adanya kerusakan tersebut. Secara keseluruhan total kerugian bangunan ialah sejumlah 5723, total kendaraan 1948, dan jumlah total fasilitas umum sebanyak 516. Kerusakan tersebut membuat kota Jakarta menjadi mencekam. Sementara itu, aksi-aksi demonstrasi masih berlanjut hingga akhirnya tanggal 18 Mei 1998 mahasiswa mampu menduduki gedung MPR/DPR. Massa yang berunjuk rasa di gedung DPR menuntut agar segera diadakan Reformasi.

Presiden Soeharto menyetujui adanya Reformasi, akan tetapi Soeharto sebenarnya menginginkan bahwa pelaksanaan Reformasi di bawah tangannya sendiri. Presiden Soeharto berusaha untuk membentuk susunan Kabinet baru untuk menyambut pemerintahan Reformasi. Ternyata, hal ini tidak dapat terwujud. Orang-orang yang dicalonkan untuk menduduki posisi-posisi penting dalam kursi kabinet ternyata menolak. Kegagalan Presiden Soeharto dalam membentuk kabinet diduga merupakan faktor penting yang mempercepat terjadinya peristiwa Reformasi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil PEMILU 1997 yang diduga diwarnai aksi kecurangan, adanya krisis multidimensi, dan insiden Trisakti dianggap sebagai penyebab utama terjadinya peristiwa Reformasi.

b. Kronologi Peristiwa Reformasi 98.

Peristiwa Reformasi 98 yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, memiliki alur yang kronologis. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi adanya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997, telah mengakibatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat menurun tajam. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diwujudkan dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa dimana-mana. Hingga awal tahun 1998, aksi-aksi mahasiswa terus berlangsung. Adanya kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok telah mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan pokok dalam jumlah yang banyak. Adanya kekhawatiran masyarakat yang berlebihan tersebut telah mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok secara drastis.

Tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti melakukan aksi keprihatinan yang berujung pada kematian empat mahasiswa dari Universitas tersebut. Meninggalnya mahasiswa Trisakti menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Setelah prosesi pemakaman empat mahasiswa tersebut, masyarakat melakukan aksi kerusakan besar-besaran terutama di daerah Jakarta. Sementara itu, mahasiswa masih tetap melakukan aksi demonstrasi yang menuntut agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya.

Tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki kantor DPR/MPR. Pada saat itu pula, pimpinan DPR menyampaikan pernyataannya yang

¹¹ Hawe Setiawan, dkk, *Negeri Dalam Kobaran Api*, LSPP, Jakarta, 1999, hlm. 30.

¹² *Kompas*, 14 Mei 1998.

¹³ *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusakan Mei 1998 (TGPF)*, 2002, hlm. 20.

mengatakan bahwa Presiden sebaiknya segera mundur. Hal ini dimuat dalam berbagai surat kabar, salah satunya surat kabar *Kompas* dengan judul *Pimpinan DPR : Sebaiknya pak Harto Mundur*.

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik Ketua maupun Wakil Ketua, mengharapakan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Demikian ditegaskan ketua DPR/MPR Harmoko, Senin (18/5) di Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, usai mengetuai Rapat Pimpinan DPR.¹⁴

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menanggapi berita tersebut dengan mengatakan bahwa itu merupakan pendapat individual. Apabila benar kenyataannya seperti itu maka, seharusnya harus melalui proses Sidang Paripurna yang diikuti oleh seluruh anggota DPR tersebut. Selain itu Pernyataan pimpinan DPR/MPR-RI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁵

Menanggapi hal tersebut, Presiden Soeharto menjelaskan bahwa mundur sebenarnya tidak jadi masalah baginya. Pernyataan ini ditegaskan oleh Presiden dalam menghadapi pemberitaan mengenai pernyataan Pimpinan DPR tersebut. Presiden Soeharto juga mengatakan bahwa, dirinya bertekad *ngamandito*.¹⁶

Aksi tuntutan-tuntutan mahasiswa yang menginginkan agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya, kemudian diimbangi dengan adanya penolakan 14 menteri yang akan dijadikan sebagai kabinet selanjutnya oleh presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa, penolakan tersebut kemungkinan didasarkan pada analisa situasi politik yang saat itu sudah menunjukkan keadaan yang cukup genting. Suatu situasi politik dimana menggambarkan suatu pemerintahan yang kehilangan legitimasi dari rakyatnya dan akan sangat sulit untuk dipertahankan. Gerakan mahasiswa semakin lama semakin intensif. Mahasiswa tetap pada tuntutan mereka yaitu menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dan segera diadakannya Reformasi.

Kegagalan Presiden Soeharto dalam membentuk kabinet baru, menjadi pukulan tersendiri bagi dirinya. Hal ini dikarenakan orang-orang yang dulunya berada dipihaknya dan selalu mendukungnya, tiba-tiba menginginkan agar Presiden Soeharto segera mengundurkan diri. Ini merupakan pukulan berat yang harus dihadapinya menjelang akhir pemerintahannya. Hanya ada dua orang yang masih tetap setia dengan Soeharto yaitu Mohammad Hasan (Menperindag) dan Fuad Bawazier (Menteri Keuangan).

Setelah adanya kejadian tersebut, tanggal 21 Mei 1998 bertepatan di Istana Merdeka akhirnya Presiden Soeharto secara resmi membacakan pengumuman bahwa dirinya mengundurkan diri dari

jabatan sebagai Presiden. Sebelumnya, Presiden memerintahkan Yusril Izha Mahendra untuk mengatur semua pelaksanaannya. Berikut adalah cuplikan isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Soeharto di Istana Negara 21 Mei 1998 :

"... Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut... Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998."¹⁷

Isi teks pidato Presiden Soeharto menunjukkan adanya rasa kekecewaan yang mendalam terhadap orang-orang terdekatnya. Dengan tidak mendapatkan kepercayaan lagi baik dari rakyat maupun dari orang-orang terdekatnya, untuk apalagi dia mempertahankan kekuasaannya. Hal ini baginya akan sangat sulit. Sebelumnya Soeharto sangat berkeinginan untuk memimpin secara langsung agenda Reformasi akan tetapi, ternyata sebelum hal itu berlangsung justru orang-orang terdekatnya yang menghancurkan impian Presiden Soeharto tersebut. Keinginan Soeharto agar dapat lengser dari jabatannya dan tetap dihormati oleh semua orang akhirnya sirna.

c. Signifikansi Surat Kabar *Kompas* Dalam Pemberitaan Peristiwa Reformasi 98.

Perjalanan surat kabar *Kompas* yang cukup panjang, telah membawa surat kabar ini meliputi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di tanah air. Salah satu dari peristiwa tersebut ialah Peristiwa Reformasi 98. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, surat kabar ini lebih intensif dalam melakukan pemberitaan mengenai turunnya Soeharto. Situasi pemerintahan yang saat itu kurang kondusif, mampu dimanfaatkan oleh *Kompas* dalam memberitakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah dan juga reaksi orang-orang terdekat Soeharto menjelang akhir pemerintahannya. *Kompas* yang Sepanjang Orde Baru selalu menduduki peringkat utama dalam dunia persuratkabaran nasional, tentunya

¹⁴ *Kompas*, 19 Mei 1998.

¹⁵ *Suara Karya*, 19 Mei 1998.

¹⁶ *Merdeka*, 20 Mei 1998.

¹⁷ Muridan S. Widjojo, *Penakluk Rezim Orde Baru : Gerakan Mahasiswa 98*, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 175-176.

memiliki peran penting dalam menginformasikan berita seputar lengsernya Soeharto dari jabatannya. Seperti yang telah dikemukakan Hill bahwa *Kompas* pada tahun 1990-an menjadi surat kabar nasional dengan tiras terbesar, tentunya *Kompas* memiliki jumlah pembaca yang besar di tanah air. Setiap berita yang diturunkan oleh surat kabar *Kompas* pasti menjadi perhatian tersendiri bagi setiap pembacanya. Hal ini tidak terkecuali pada penyampaian berita mengenai serangkaian peristiwa mundurnya Soeharto. Porsi berita surat kabar *Kompas* pada Mei 1998, memang lebih banyak mengarah ke arah kondisi politik Indonesia menjelang akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Surat kabar *Kompas* selalu menempatkan berita-berita yang berkaitan dengan hal tersebut dalam rangkaian berita utama.

Menjelang akhir pemerintahan Presiden Soeharto, pemberitaan dalam surat kabar *Kompas* memiliki sedikit keunggulan dibandingkan dengan surat kabar lainnya. Keunggulan tersebut ialah dimana surat kabar ini mampu mengungkap bagaimana orang-orang disekitar Soeharto menjelang kejatuhannya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lebih cepatnya mundurnya Presiden Soeharto dan juga apa saja yang menjadi kekurangan dalam masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia.

Secara garis besar pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana berita-berita penting yang diberitakan oleh *Kompas*, khususnya yang menyangkut peristiwa Reformasi 98 dan dapat menambah informasi maupun gambaran bagi para pembacanya. Berita-berita penting tersebut diantaranya ialah berita mundurnya Presiden Soeharto setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998, berita mengenai orang-orang terdekat Soeharto menjelang kejatuhannya, berita mengenai peristiwa reformasi 98 dan juga perubahan bidang politik, pemerintahan dan pers setelah lengsernya Presiden Soeharto. Berita-berita tersebut tidak banyak diberitakan oleh surat kabar lainnya. Namun, disini *Kompas* mencoba untuk memberitakannya dengan baik.

Pemberitaan Mundurnya Presiden Soeharto

Pada tanggal 14 Mei 1998, semua media massa cenderung fokus memberitakan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan pada saat itu memang menjadi topik hangat perbincangan. Banyak yang mengkaitkan antara peristiwa kerusuhan tersebut dengan insiden penembakkan mahasiswa di Trisakti. Pada tanggal tersebut surat kabar *Jawa Pos* memberitakan bahwa kerusuhan sebenarnya bermula dari kawasan Trisakti. Tidak diketahui apa penyebabnya, namun kerusuhan tersebut terjadi setelah pemberangkatan upacara pemakaman mahasiswa Trisakti yang ditembak oleh aparat keamanan. Dari aksi kerusuhan tersebut dapat diketahui bahwa pertokoan dan bank tidak luput dari kemarahan massa. Bank yang dinataranya ikut terkena dampak kerusuhan ini ialah BNI dan BCA. Bank BI saat itu segera memerintahkan kepada seluruh karyawan untuk segera pulang karena situasi

tidak aman. Berikut adalah pemberitaan *Jawa Pos* tanggal 14 Mei 1998 yang fokus memberitakan mengenai gambaran peristiwa kerusuhan di Jakarta.

Insiden 12 Mei yang menyebabkan enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas menyulut kerusuhan lanjutan. Gejala kerusuhan yang terjadi hingga tadi malam itu berlangsung di beberapa kawasan ibu kota, seperti Grogol, Roxy, Jalan S. Parman, dan daerah Bendungan Hilir. Aksi kali ini tak hanya melibatkan para mahasiswa. Massa yang jumlahnya ribuan merusak dan membakar puluhan mobil diantaranya mobil mewah, *took*, dan SPBU. Akibat kerusuhan tersebut, sedikitnya Sembilan orang menderita luka tembak. Kerusuhan tersebut juga menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta lumpuh total untuk beberapa jam.¹⁸

Selain surat kabar *Jawa Pos*, pada hari yang sama surat kabar *Suara Karya* juga memberitakan mengenai aksi kerusuhan tersebut. Pada tanggal 14 Mei 1998, halaman utama surat kabar *Suara Karya* penuh dengan pemberitaan mengenai aksi kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Surat kabar ini memberitakan mengenai suasana di Jakarta pada saat terjadinya kerusuhan, permintaan pemerintah agar masyarakat menahan diri dan Pangab ABRI yang berjanji akan mengusut tuntas mengenai insiden Trisakti.

Pada saat surat kabar lainnya sedang sibuk memberitakan mengenai aksi kerusuhan, surat kabar *Kompas* justru menurunkan berita yang mengejutkan. Isi beritanya ialah mengenai esensi pernyataan Soeharto yang menyatakan apabila rakyat tidak menghendaki dirinya lagi, maka dirinya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata. Kalimat tersebut seolah menunjukkan bahwa sebenarnya Soeharto merasa rakyat sudah tidak mempercayainya lagi. Kata-kata bahwa dirinya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata, seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak akan mempertahankan kekuasaannya lagi dan siap mundur. Berikut adalah cuplikan beritanya :

Presiden Soeharto mengemukakan, kalau memang rakyat tidak lagi menghendaki dirinya sebagai Presiden, maka dirinya siap mundur. Ia tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Ia akan mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dengan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Namun, Presiden menggarisbawahi semua itu harus dilakukan secara konstitusional. "Kalau ada yang ingin melakukannya secara inskonstitusional, maka iu berarti mengkhianati Pancasila dan UUD 1945," Kata Presiden Soeharto dalam acara temu muka dengan masyarakat Indonesia di Mesir (13/5).¹⁹

Ucapan Presiden Soeharto tersebut dijadikan sebagai berita utama surat kabar *Kompas*, 14 Mei 1998. Hal tersebut dianggap sebagai informasi penting yang harus segera disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat saat itu sudah lama menginginkan agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Apalagi

¹⁸ *Jawa Pos*, 14 Mei 1998.

¹⁹ *Kompas*, 14 Mei 1998.

selama terjadinya berbagai macam krisis di Indonesia, pemerintahan Soeharto dianggap tidak lagi mampu mengatasi permasalahan tersebut. Pemberitaan yang dilakukan oleh *Kompas* mengenai pernyataan Presiden tersebut, merupakan suatu pertanda bagi masyarakat bahwa pemerintahan Soeharto tidak akan bertahan lama lagi. Berita yang dimuat dalam surat kabar *Kompas* mengenai pernyataan Presiden Soeharto tersebut, akhirnya menyebar dengan begitu cepat. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja, akan tetapi masyarakat luar negeri juga mendengar kabar tersebut. Wartawan *Kompas* yang saat itu ikut menghadiri acara Presiden di Kairo, menjadi pihak yang dicari-cari oleh wartawan asing untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Banyak wartawan asing yang ingin menanyakan kepada *Kompas*, mengapa ada pemberitaan seperti itu dan bagaimana kronologi pengucapan hal tersebut.

Setelah mendengar berita tersebut, Harmoko selaku ketua DPR/MPR mengatakan bahwa, "Dewan akan membahasnya dalam Rapat Pimpinan paling lambat minggu depan."²⁰ Sementara itu, banyak kalangan dari gerakan Reformis yang menuntut agar Presiden Soeharto segera mengundurkan diri. Pemberitaan tersebut ternyata juga memberikan dampak terhadap masyarakat yang saat itu ikut melakukan aksi kerusuhan. Setelah adanya berita tersebut, kerusuhan semakin menjadi-jadi. Situasi saat itu semakin tidak terkendali.²¹

Melihat kondisi Indonesia yang sudah sedemikian rupa, akhirnya Soeharto memutuskan untuk mempercepat keputingannya dari Kairo. Menanggapi pemberitaan yang ada, Soeharto segera memberikan tanggapannya. Dirinya seolah membantah mengenai pemberitaan yang ada. Bantahan tersebut disampaikan Presiden kepada seluruh masyarakat Indonesia dan banyak diliput media massa. Bahkan media massa yang tidak ikut memberitakan mengenai "Presiden siap mundur", pada akhirnya ikut membuat bantahan dari berita tersebut juga. Hal ini dikarenakan pemberitaan pernyataan mundurnya Presiden telah menyita perhatian masyarakat. Saat itu banyak yang mengira bahwa mungkin ini saatnya Presiden Soeharto benar-benar ingin mengundurkan diri. Sebelumnya, Presiden Soeharto hanya mengungkapkan tentang konsepnya mengenai lengser keprabon. Namun demikian, kenyataannya hal tersebut tidak lekas terwujud. Berikut adalah bantahan Presiden Soeharto mengenai pemberitaan yang ada.

Presiden Soeharto menegaskan, pihaknya tidak pernah menyatakan siap mundur. Presiden menyatakan, tidak apa-apa bila masyarakat sudah tidak lagi memberi kepercayaan, karena dirinya akan *madeg* (menjadi) *pandito*, yakni mendekatkan diri kepada Tuhan, membimbing anak-anak supaya menjadi baik, serta kepada masyarakat bias memberi nasihat dan *tut wuri handayani* (membimbing dari belakang). Karena itu, Presiden tidak akan mempertahankan kepercayaan rakyat itu dengan kekuatan senjata.²²

Bantahan Presiden Soeharto mengenai pernyataan sebelumnya, telah membuat masyarakat terutama golongan reformis kecewa. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan meminta agar Presiden Soeharto segera mengundurkan diri. Meskipun Presiden Soeharto telah meralat pemberitaan surat kabar *Kompas* mengenai kesiapan dirinya mundur, hal tersebut tidak membuat gentar para Reformis untuk tetap menuntut agar segera diadakannya pembaruan dalam bidang pemerintahan. Pada tanggal 18 Mei 1998 mahasiswa mampu menduduki gedung DPR/MPR. Pemberitaan mundurnya Presiden menjadi pembakar semangat tersendiri bagi mereka. Saat itu Presiden Soeharto dianggap mengulur-ulur waktu. Setelah adanya pemberitaan ini, kemudian disusul oleh pemberitaan lainnya yaitu sikap orang-orang terdekat Soeharto menjelang Reformasi 98.

Dari pemberitaan ini, surat kabar *Kompas* memiliki keunggulan dibandingkan dengan surat kabar lainnya dalam memberitakan mengenai kemunduran Presiden Soeharto. Pada saat surat kabar lainnya masih memberitakan mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998, surat kabar *Kompas* justru memuat pemberitaan mengenai akan mundurnya Presiden Soeharto apabila rakyat tak lagi menghendakinya. Dengan adanya pemberitaan tersebut dan juga berita mengenai bantahan Presiden Soeharto, disini *Kompas* sepertinya ingin menunjukkan bahwa Presiden Soeharto cenderung kurang konsisten terhadap apa yang diucapkan mengenai kemundurannya menjadi Presiden. Sebelumnya Presiden juga sering mengungkapkan keinginannya untuk Lengser Keprabon, namun demikian hal ini tidak terlaksana juga hingga akhirnya dirinya mulai ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya.

Pemberitaan Sikap Orang-orang Terdekat Soeharto Menjelang Kejatuhannya.

Berita utama surat kabar *Kompas* tanggal 17 Mei 1998, berisikan tentang sindiran Sultan terhadap pemerintah yang tidak lagi dipercayai oleh rakyatnya. Berikut adalah cuplikan beritanya :

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, kepercayaan adalah relasi inter-obyektif yang mengandaikan rasa hormat terhadap mereka yang dipercayai. Sebagai relasi inter-subyektif, kepercayaan adalah bentuk komunikasi antarmanusia atau antarkelompok. Rakyat percaya kepada pemerintah, karena terjadi komunikasi antarkeduanya. Krisis kepercayaan terjadi, jika komunikasi itu putus. Kehilangan kepercayaan sama artinya dengan hilangnya rasa hormat.²³

Dengan memuat berita ini, tentunya *Kompas* juga turut serta dalam melakukan sedikit serangan terhadap pemerintah yang saat itu tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya. Menjelang akhir pemerintahan Soeharto, *Kompas* memang terlihat cenderung lebih berani dalam memberitakan situasi politik Indonesia saat itu. Pada masa itu pula, surat kabar *Kompas* semakin gencar dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pengontrol sosial. Pada saat itu, tidak banyak yang memberitakan mengenai

²⁰ *Kompas*, 15 Mei 1998.

²¹ James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 126.

²² *Kompas*, 16 Mei 1998.

²³ *Kompas*, 17 Mei 1998.

sikap orang-orang terdekat Soeharto pada saat menjelang jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Padahal sebenarnya faktor utama yang menyebabkan Soeharto akhirnya mundur ialah dikarenakan dirinya merasa mulai ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh surat kabar *Kompas* dalam memberitakan mengenai proses kejatuhan Presiden Soeharto.

Dengan menampilkan pendapat Sultan dalam berita utamanya, *Kompas* ingin mengajak para pembacanya baik masyarakat dan juga tokoh pemerintah untuk memikirkan kembali kondisi Indonesia saat itu. Bagi Sultan apabila pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyat maka, pemerintah dianggap telah kehilangan segala-galanya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bernegara, kesejahteraan rakyat adalah yang pertama. Untuk apa pemerintah tetap ngotot mempertahankan kekuasaannya, jika rakyat sudah tidak mempercayainya lagi dan juga tidak menghormatinya lagi. Pada dasarnya, suatu pemerintahan akan dapat berdiri kokoh apabila mendapat dukungan dari rakyatnya. Jika sudah tidak ada kepercayaan lagi, maka suatu pemerintahan tersebut tidak ada artinya lagi dan lebih baik segera diperbarui dengan jalan reformasi.

Pemberitaan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa, Sultan Hamengku Buwono X mulai meninggalkan pemerintahan Soeharto dan mendengarkan aspirasi rakyat yang menginginkan agar Presiden segera mengundurkan diri. Tanggapan Sultan tersebut seperti menjadi pertanda awal bahwa, perlahan-lahan orang yang berada di sekitar Soeharto mulai meninggalkannya. Setelah memberitakan mengenai tanggapan Sultan atas krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, *Kompas* memberitakan himbauan Pimpinan DPR agar Presiden segera mengundurkan diri. Berikut adalah cuplikan beritanya:

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik Ketua maupun para Wakil Ketua mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Demikian ditegaskan ketua DPR/MPR Harmoko, Senin (18/5) di Gedung DPR/MPR Jakarta, usai mengetuai Rapat Pimpinan DPR.²⁴

Pernyataan Pimpinan DPR yang menginginkan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, seaneamanya merupakan suatu pertanda bahwa Pimpinan DPR telah mendengarkan aspirasi rakyat dan juga mulai meninggalkan Presiden Soeharto. Tidak hanya itu saja, *Kompas* juga memuat pemberitaan mengenai mundurnya 11 Menteri Ekuin dari kabinet Soeharto. Kemungkinan besar mereka mundur ialah karena melihat kondisi pemerintahan yang tidak lagi kondusif dan juga gencarnya media massa dalam memberitakan mengenai orang-orang terdekat Soeharto yang mulai meninggalkannya. Berikut adalah beritanya :

Sebanyak 11 Menteri di lingkungan ekonomi, keuangan dan industri (Ekuin) Kabinet Pembangunan VII hari Rabu

(20/5) malam menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto. Hanya sekitar dua menteri Ekuin yang tidak mengundurkan diri, yakni Menperindag Mohamad Hasan dan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Keduanya menunggu reshuffle kabinet.²⁵

Dengan memuat pemberitaan tersebut, *Kompas* sebenarnya ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa, Soeharto telah ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Adanya pemberitaan semacam ini tentunya semakin mempercepat lengsernya Soeharto sebagai Presiden dan dapat membuka pikiran baru bagi orang-orang terdekat Soeharto yang masih setia untuk memahami situasi yang terjadi. *Kompas* termasuk sebagai salah satu surat kabar yang turut serta menjatuhkan Presiden Soeharto dengan pemberitaan-pemberitaannya menjelang jatuhnya Presiden Soeharto.

Dalam hal ini *Kompas* memiliki keunikan dimana surat kabar ini menyoroti pemberitaan dari orang-orang terdekat Soeharto yang kemudian meninggalkannya. Hal ini tidak banyak dilakukan surat kabar lainnya. Pada saat itu, banyak surat kabar hanya memuat pemberitaan dari golongan yang berseberangan dengan Presiden. Padahal sebenarnya, yang mempengaruhi bertahannya kekuasaan Presiden ialah dari sikap dan dukungan orang-orang terdekatnya. Apabila orang-orang terdekatnya mulai meninggalkannya, maka Presiden tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi dalam memimpin. Hal ini ternyata terbukti benar. Setelah banyaknya pemberitaan mengenai orang-orang terdekat Presiden yang mulai meninggalkannya, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri. Dengan memuat berita seputar orang-orang Soeharto yang meninggalkannya, *Kompas* sebenarnya saat itu pula mulai tampil lebih berani. Selain itu, *Kompas* juga mulai menjalankan perannya sebagai pengontrol sosial dengan baik.

Pemberitaan Pro-Kontra Mundurnya Presiden Soeharto.

Mundurnya Presiden Soeharto seperti belum memuaskan tuntutan mahasiswa. Meskipun setelah mendengar pidato Presiden mereka bergembira, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Banyak pihak yang tetap menuntut pengunduran diri Soeharto tersebut melalui Sidang Istimewa. Dengan adanya sidang tersebut, Presiden Soeharto akan dimintai pertanggungjawaban selama memimpin Indonesia. Banyak pula yang menilai bahwa Proses mundurnya Presiden Soeharto tersebut merupakan inkonstitusional.

Prof. Dr. Dimiyati Hartono, S.H. dan juga Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H berpendapat bahwa, proses pengunduran diri Presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie merupakan suatu penyimpangan. Mereka berlandaskan pasal 9 UUD 1945. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden telah bersumpah menurut agama, atau berjanji sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Seharusnya Presiden Soeharto mengembalikan mandatnya terlebih dahulu kepada MPR, mengingat

²⁴ Ibid.

²⁵ *Kompas*, 21 Mei 1998.

bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan yang memberi mandat kepada Presiden. Peristiwa yang terjadi saat itu adalah ketika Presiden Soeharto mundur, langsung menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Prof. Dr. M. Dimiyati Hartono, S.H. berpendapat bahwa sebenarnya terdapat kepentingan politik yang disembunyikan dengan adanya pengunduran diri Presiden yang demikian. Kepentingan politik tersebut ialah kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk memberi pertanggungjawaban selama pemerintahannya.²⁶

Di lain pihak, Jenderal A.H. Nasution mengemukakan pendapat yang lain mengenai pelaksanaan Sidang Istimewa. Menurut Sidang Istimewa tidak perlu dilakukan. Hal ini mengingat bahwa proses penyerahan jabatan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie dianggap konstitusional. Menurut Nasution tuntutan Sidang Istimewa hanya akan semakin memperpanjang masalah. Oleh karena itu, dirinya mendukung Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang akan mentaati langkah Pak Harto.²⁷ Sebenarnya, pada saat itu banyak pihak yang takut apabila proses pengunduran Presiden Soeharto ditunda-tunda, maka Presiden Soeharto justru akan membatalkannya.

Menanggapi permasalahan mengenai sah atau tidaknya langkah yang diambil Presiden Soeharto, surat kabar *Kompas* meliput pemberitaan dengan para ahli hukum dan pemerintah untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut. Pada tanggal 22 Mei 1998, *Kompas* memuat berita yang berjudul *Dari Sisi Hukum Tata Negara Mundurnya Soeharto Timbulkan Pro-Kontra*. Berita ini memang sengaja dimuat untuk membantu menjawab permasalahan yang ada sebagai akibat proses pengunduran diri Presiden Soeharto yang tidak melalui Sidang Istimewa. Dalam berita ini dimuat pendapat-pendapat dari Ahli Hukum untuk membahas mengenai konstitusional atau tidaknya Proses pengunduran diri Soeharto. Diantaranya ialah Ahli Hukum Tata Negara UI Harun Alrasid, Prof. Dr. Dimiyati Hartono, Ketua Fraksi Karya Pembangunan, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Berikut adalah cuplikan beritanya yang dimuat dalam surat kabar *Kompas* mengenai pendapat para tokoh sah atau tidaknya mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Keputusan Soeharto untuk berhenti sebagai Presiden RI 1998-2003 dan diangkatnya Wapres Habibie sebagai Presiden, ditanggapi pro dan kontra oleh ahli hukum tata negara. Ahli Hukum Tata Negara UI, Prof. Dr. Harun Alrasid memandang proses suksesi di Istana Merdeka itu konstitusional. Sedangkan ahli hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Dimiyati Hartono berpendapat langkah itu inkonstitusional. Sementara Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Irsjad Sudiro dan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz sama-sama menganggapnya konstitusional.²⁸

Menurut Harun, pengunduran diri Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie merupakan suatu tindakan yang sah. Hal tersebut berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Selama ini banyak pihak yang menilai bahwa proses pengunduran diri Soeharto yang kemudian dilanjutkan oleh pengangkatan Presiden Habibie merupakan tidak sah. Setelah mengundurkan diri, seharusnya Presiden Soeharto mengembalikan mandat. Hal ini justru menurut Harun Alrasid yang tidak ada dalam konstitusi. Sementara itu, Dimiyati mengungkapkan bahwa alasan penyempuhan Habibie tersebut karena DPR tidak mungkin bersidang. Dirinya menambahkan bahwa Istana Merdeka bukanlah gedung wakil rakyat. Dimiyati juga menegaskan bahwa pada saat itu Presiden Soeharto memang ingin cepat mengundurkan diri. Seharusnya Presiden Soeharto tidak langsung menyerahkan tanggungjawabnya kepada Wapres Habibie. Menurut pelantikan Wapres menjadi Presiden bisa dilakukan pada waktu berikutnya. Presiden Soeharto seharusnya mengembalikan mandat kepada MPR selaku mandataris. Tindakan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan langsung kepada B.J. Habibie dianggap telah menurunkan kredibilitas DPR. Padahal saat itu, DPR masih berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh mahasiswa yang proreformasi untuk mengarahkan tujuannya pada lembaga legislatif.²⁹

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum UI Harun Alrasid menegaskan bahwa selama ini terjadi salah paham mengenai istilah mandataris MPR. Dirinya menegaskan bahwa istilah mandataris tidak dikenal dalam UUD 1945, tetapi malah dijadikan pegangan di MPR. Harun juga menjelaskan kepada *Kompas* bahwa terdapat tiga kriteria pasal 8 UUD 1945 yang mengatur tidak berfungsinya lembaga kepresidenan dimana kemudian wakil presiden akan naik menjadi presiden. Pertama, apabila Presiden wafat atau meninggal dunia. Kedua, jika presiden berhenti. Ketiga, apabila presiden tidak mampu melakukan kewajibannya. Dirinya menegaskan pula bahwa selain ketiga kriteria tersebut, terdapat satu kriteria lagi yang telah diatur dalam Tap VII/MPR/1973. Dalam Tap MPR tersebut diatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban presiden apabila tidak melaksanakan amanat UUD 1945 dan GBHN. Dari pernyataan tersebut, Harun kembali menjelaskan mengenai permintaan pertanggungjawaban kepada Soeharto yang saat itu tidak lagi memerintah merupakan hal yang tidak tepat.³⁰

Pernyataan yang telah diungkapkan oleh Harun Alrasid secara tidak langsung menunjukkan bahwa, pengunduran diri Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh wakilnya adalah sah dan konstitusional. Mengenai pertanggungjawaban Presiden Soeharto dirasa tidak tepat. Saat itu Presiden Soeharto belum menuntaskan masa kepemimpinannya untuk periode 1998-2003. Soeharto baru memerintah pada periode tersebut selama kurang lebih dua bulan dan langsung digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pemberitaan

²⁶ James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 29-30.

²⁷ *Merdeka*, 22 Mei 1998.

²⁸ *Kompas*, 22 Mei 1998.

²⁹ *Kompas*, 22 Mei 1998.

³⁰ *Ibid.*

terakhir dalam surat kabar *Kompas*, dituliskan mengenai tanggapan ketua F-PP Hamzah Haz yang menyatakan bahwa peristiwa penyerahan jabatan dari Presiden kepada wakilnya tersebut terjadi begitu cepat dan juga menjelaskan kembali mengenai Tap pasal 2 Tap MPR No. VII/MPR/1973.

Dengan memuat pernyataan Harun Alrasid dan Hamzah Haz sebagai penutup berita maka, surat kabar *Kompas* secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat bahwa pengunduran diri Presiden Soeharto dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai penggantinya ialah sah menurut pasal 8 UUD 1945 dan juga telah memenuhi Tap MPR No VII/1973. Selain itu dengan memuat berita ini, surat kabar *Kompas* tentunya membantu masyarakat terutama para pembaca untuk mengetahui situasi yang terjadi. Pengunduran diri Soeharto yang kemudian digantikan oleh wakilnya adalah sah. Berita ini sekaligus membantah beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak sah. Dalam hal ini surat kabar *Kompas* telah berperan penting dalam membantu menjawab keraguan masyarakat saat itu. Selain itu, pada hari yang sama, tidak banyak surat kabar yang memberitakan mengenai situasi setelah mundurnya Presiden Soeharto dari kursi jabatannya, terutama mengenai Pro-Kontra mundurnya Presiden Soeharto.

Pada saat itu, sebagian besar surat kabar memberitakan mengenai berhentinya pak Harto, Presiden B.J. Habibie yang meminta dukungan dari rakyat dan juga pemerintahan baru Habibie yang dipenuhi dengan kebanjiran *deadline*. Misalnya, tanggal 22 surat kabar *Jawa Pos* memberitakan mengenai awal mula pemerintahan Habibie yang kebanjiran *deadline*. Berikut cuplikan beritanya:

Meski mendapat dukungan sejumlah kelompok masyarakat masih menunggu apa yang dilakukan Presiden baru ini. Misalnya, Gema Madani pimpinan Prof. Dr. Emil Salim, kelompok Dr. Nurcholish Madjid, Gerakan Reformasi Nasional (GRN) pimpinan Prof. Dr. Subroto, dan bahkan Amien Rais sendiri. Emil misalnya, memberikan waktu enam bulan kepada Habibie untuk melakukan Reformasi total, termasuk menyiapkan pemilu dengan UU baru. Dalam waktu tiga bulan, ia harus bisa menyusun Kabinet yang tidak diwarnai KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).³¹

Pemberitaan Perubahan Politik dan Pers Setelah Terjadinya Peristiwa Reformasi 98.

Setelah terjadinya peristiwa Reformasi 98, kehidupan politik dan pers mengalami suatu perubahan. Langkah pertama Presiden Habibie dalam bidang politik ialah dengan membebaskan para tahanan politik yang ditahan oleh pemerintah Orde Baru. Upaya membebaskan para tahanan politik tersebut untuk menunjukkan bahwa, pemerintahan Habibie cenderung berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Tahanan politik merupakan orang-orang yang dianggap telah menentang Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Salah satunya ialah Sri

Bintang Pamungkas. Dengan tuduhan telah melakukan subversif, akhirnya Sri Bintang Pamungkas ditahan. Perbedaan pemikiran antara dirinya dengan pemerintah Orde Baru telah menimbulkan jurang pemisah antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, Sri Bintang Pamungkas tidak senang terhadap pemerintah Orde Baru yang menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi. Dirinya menginginkan adanya pemerintahan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, Sri Bintang Pamungkas juga merupakan salah satu tokoh yang menolak hasil Pemilu 1997. Hal ini kemudian membuat Presiden Soeharto marah. Selanjutnya Sri Bintang Pamungkas di tahan sebagai tahanan politik dengan tuduhan subversif. Sri Bintang Pamungkas akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah terjadinya pergantian pemerintahan.

Pembebasan Sri Bintang dan tahanan politik lainnya merupakan langkah politik pertama yang dilakukan oleh Presiden Habibie. Surat kabar *Kompas* memuat pemberitaan mengenai pembebasan tahanan politik sebagai akibat adanya peristiwa Reformasi 98. Surat kabar ini nampaknya tidak hanya meliput berita mengenai sebelum peristiwa reformasi saja, akan tetapi juga bagaimana kehidupan politik dan pers setelah terjadinya peristiwa Reformasi 98.

Pada tanggal 26 Mei 1998, *Kompas* memberitakan mengenai Sri Bintang Pamungkas yang telah meninggalkan LP Cipinang. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden Habibie untuk memperbaiki kehidupan politik di Indonesia. Berikut beritanya :

Tepat pukul 01.00 WIB dini hari, Selasa (26/5), Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas (53) meninggalkan gerbang Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta. Lima menit kemudian, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Dr. Muchtar Pakpahan (45) menyusul Bintang meninggalkan LP Cipinang. Keduanya dibebaskan setelah mendapat *amnesty* dan/atau abolisi berdasarkan keputusan Presiden No 80 tahun 1998. Kepres tersebut ditandatangani Presiden B.J. Habibie, Senin (25/5) malam.³²

Pembebasan para tahanan politik merupakan suatu langkah awal Presiden Habibie dalam menegakkan Reformasi dalam bidang politik dan juga sekaligus terhadap hukum. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah memang sangat mengintervensi dalam kehidupan politik. Siapa saja yang dianggap menentang Presiden Soeharto saat itu, akan dijadikan sebagai tahanan politik. Meskipun belum semua tahanan politik dibebaskan, namun pemerintah berjanji secepatnya akan membebaskan para tahanan politik.

Menkeh Muladi dalam surat kabar *Kompas* menjelaskan bahwa dirinya akan menjanjikan adanya kompromi untuk membebaskan semua tahanan politik secara bertahap dan selektif. Untuk masalah tahanan

³¹ *Jawa Pos*, 22 Mei 1998.

³² *Kompas*, 26 Mei 1998.

politik yang berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI, dirinya akan memikirkan lagi.³³

Dengan memuat pemberitaan mengenai pembebasan tahanan politik, *Kompas* telah berperan penting dalam menyampaikan berita mengenai perubahan bidang politik di Indonesia kepada masyarakat. Disini peran *Kompas* sebagai penyalur informasi berita telah terpenuhi dengan baik. Surat kabar *Kompas* memang cenderung memberitakan mengenai keadaan politik dan pers Indonesia setelah Orde Baru. Hal ini dikarenakan dua aspek tersebut yang paling dominan dan yang paling terkesan sering mengalami pengekangan oleh pemerintah Orde Baru.

Selain membebaskan para tahanan politik, *Kompas* juga memberitakan mengenai sikap Presiden Habibie yang memberikan kebebasan terhadap siapa saja yang ingin membentuk partai politik. Pada masa Orde Baru, yang diperkenankan mengikuti pemilu hanyalah 3 partai yaitu : GOLKAR, PPP, dan PDI. Namun, setelah Presiden Habibie memerintah, hal ini tidak berlaku lagi. Berikut adalah pernyataan Presiden Habibie yang dimuat dalam surat kabar *Kompas* :

“ Siapa saja boleh membentuk partai. Namun dengan kesadaran, semua harus berasaskan Pancasila dan UUD '45. Karena Pancasila dan UUD '45 tidak mengenal SARA dalam bentuk apa pun. Maka partai-partai itu tidak boleh ada unsur SARA. Itu tidak akan kita tolerir. Apa saja terserah,” kata Habibie.³⁴

Pada Pemilu tahun 1999, jumlah partai yang mengikutinya ada 48 partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa Habibie menerapkan pemerintahan yang demokratis. Selain memberitakan perubahan dalam bidang politik, surat kabar *Kompas* juga memberitakan mengenai adanya perubahan dalam bidang media massa. Pada saat Presiden Soeharto memerintah, kehidupan media massa sangat diawasi dan dibatasi. Setelah terjadinya peristiwa Reformasi 98, kehidupan media massa semakin semakin berubah. Setelah adanya peristiwa Reformasi 98, pemerintah tidak lagi mengekang kehidupan pers. Selain itu, pemerintah juga mengembalikan SIUPP beberapa surat kabar yang telah dicabut.

Pada tanggal 26 Mei 1998, *Kompas* memuat berita mengenai harapan Amir Syamsuddin yang merupakan seorang praktisi hukum dan berharap agar Menpen bersedia untuk mengembalikan SIUPP yang telah dicabut pada masa Orde Baru berkuasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa, selama pemerintahan Orde Baru berlangsung telah terjadi banyak pencabutan SIUPP terhadap sejumlah surat kabar. Sebelumnya juga telah diketahui bahwa, pemerintah telah mencabut SIUPP dari *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*.³⁵

Selama ini SIUPP dianggap telah merugikan banyak pihak, khususnya di bidang dunia pers. Menanggapi hal tersebut, *Kompas* tanggal 27 Mei 1998 memberitakan pernyataan pemerintah yang akan segera

mencabut pembatalan SIUPP. *Kompas* memuat pemberitaan mengenai pertemuan Presiden Habibie dengan tokoh masyarakat mengenai pembahasan SIUPP. Pada saat melakukan pertemuan tersebut, Presiden Habibie berkomitmen bahwa dirinya akan segera mencabut Peraturan Menteri Penerangan No 1 tahun 1984 tentang pembatalan SIUPP. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Presiden Habibie akan merehabilitasi surat kabar atau majalah yang pernah dibredel termasuk *Tempo*, *DeTik*, dan *Editor*. Dalam pertemuan itu, Nurcholish berpedapat bahwa, “ kebebasan pers harus sudah kita miliki sekarang. Karena itu, kita tidak usah Tanya-tanya lagi, apakah ini sudah bisa diberitakan atau tidak. Asalkan saudara bertanggungjawab sendiri kalau beritanya salah,” demikian tegasnya.³⁶

Pemberitaan surat kabar *Kompas* mengenai kehidupan politik dan pers setelah Orde Baru berakhir sangatlah penting. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa, pemerintahan yang baru telah mengubah beberapa peraturan politik dan pers pada pemerintahan sebelumnya. Peraturan lama banyak dirombak. Tidak ada lagi istilah tahanan politik dan juga pembatasan terhadap pers. Hingga saat ini, pers bebas dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol sosial dengan baik. Setelah adanya pembatalan pencabutan SIUPP, majalah *Tempo*, *Editor* dan *DeTik* terbit kembali.

Surat kabar *Kompas* memang cukup lengkap dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air, baik menjelang maupun setelah peristiwa Reformasi 98. Melalui pemberitaan-pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar *Kompas*, masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi penting mengenai hal-hal yang menyebabkan lebih cepatnya terjadi peristiwa reformasi di Indonesia.

Beberapa pemberitaan penting memang hanya dimuat dalam surat kabar *Kompas*, salah satunya ialah berita penting mengenai pernyataan Soeharto yang siap mundur dan dimuat dalam surat kabar untuk pertama kali. Pemberitaan ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa, yaitu meningkatnya semangat mahasiswa yang menuntut agar Presiden Soeharto segera mengundurkan diri.

Secara keseluruhan, *Kompas* mampu memanfaatkan kedudukannya sebagai surat kabar terbesar di Indonesia yang mampu memberitakan peristiwa Reformasi 98 dengan lengkap dan baik. *Kompas* mampu tampil sebagai surat kabar yang mampu menarik perhatian pembaca dengan menampilkan berita-berita penting yang dapat menambah informasi pembaca. Selain itu, melalui berbagai pemberitaannya *Kompas* merupakan surat kabar yang turut mempercepat proses lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya melalui pemberitaan-pemberitaannya.

³³ *Kompas*, 26 Mei 1998.

³⁴ *Kompas*, 30 Mei 1998.

³⁵ *Kompas*, 26 Mei 1998.

³⁶ *Kompas*, 27 Mei 1998.

PENUTUP

a. Simpulan

Peristiwa Reformasi 98 telah memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Berkat adanya peristiwa Reformasi 98, saat ini kehidupan politik dan pers tidak terlalu dikekang oleh pemerintah. Saat ini tidak dikenal lagi adanya tahanan politik dan sebagainya. Semua ini berkat adanya peristiwa Reformasi 98. Dapat diketahui sebelumnya bahwa, penyebab terjadinya peristiwa Reformasi 98 ialah adanya krisis disegala bidang (ekonomi, politik, sosial). Untuk krisis ekonomi sendiri diawali ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997. Krisis politik dimulai pada saat orang-orang yang berusaha mengkritik pemerintah kemudian dianggap sebagai subversif, dan kemudian ditahan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak menerapkan sistem demokrasi yang benar.

Krisis sosial lebih disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang yang tinggal di Indonesia. Kesuksesan kehidupan masyarakat pendatang seperti Tionghoa telah menimbulkan perasaan iri terhadap masyarakat asli Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi, maka hal ini kemudian semakin parah. Dari adanya hal tersebut, krisis tersebut kemudian berkembang menjadi terjadinya konflik antar etnis dan agama. Semua krisis tersebut mengakibatkan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan kemudian masyarakat melakukan aksi kerusuhan pada 13-16 Mei 1998. Aksi ini merupakan bagian dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Saat itu masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi segala krisis yang ada. Peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, kerusuhan Mei 1998, dan juga peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR merupakan faktor pendorong lebih cepatnya peristiwa Reformasi.

Peristiwa Reformasi 98 menarik perhatian media massa, tidak terkecuali surat kabar *Kompas*. Surat kabar ini memang memiliki sedikit keunggulan dalam hal pemberitaan daripada surat kabar lainnya. Kelebihannya ialah dimana surat kabar *Kompas* mampu mengungkap bagaimana orang-orang disekitar Soeharto menjelang kejatuhannya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lebih cepatnya proses kemunduran Presiden Soeharto dan juga apa saja yang menjadi kekurangan dalam masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia.

Surat kabar *Kompas* tidak hanya menampilkan suatu peristiwa yang terjadi, tetapi juga menambahkannya dengan tanggapan dari berbagai pihak. Hal ini yang menjadikan surat kabar ini memiliki analisis lebih tajam dibandingkan dengan media massa lainnya. Pemberitaan yang dilakukan oleh *Kompas* cenderung bersifat netral dan membantu masyarakat untuk memahami kondisi yang sebenarnya sedang terjadi. *Kompas* juga telah membantu masyarakat dalam menjawab mengenai

sah atau tidaknya proses pengunduran diri Presiden Soeharto, yang kemudian langsung dilanjutkan oleh dilantikannya B.J. Habibie sebagai Presiden yang baru. Pada dasarnya *Kompas* memiliki peran penting dalam memberitakan mengenai peristiwa Reformasi 98. Selain itu, *Kompas* tidak hanya memuat berita mengenai peristiwa-peristiwa sebelum Reformasi 98, akan tetapi juga situasi setelahnya.

b. Saran

Peristiwa Reformasi 98 merupakan peristiwa sejarah yang cukup penting. Oleh sebab itu kita wajib mempelajarinya dan mengambil setiap hikmah dari pelajaran yang ada. Mengantarkan Indonesia ke gerbang Reformasi 98 sangatlah tidak mudah dan membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Seperti yang telah dijelaskan pada tulisan ini. Sebagai generasi penerus, hendaknya kita meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan kehidupan bangsa Indonesia hingga sedemikian rupa. Untuk meneruskan membangun bangsa, kita dapat belajar dari sejarah terlebih dahulu sebagai pengalaman hidup. Belajar sejarah Reformasi 98 dapat kita lakukan salah satunya ialah membaca surat kabar *Kompas* yang turut serta memberitakan peristiwa bersejarah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Surat Kabar *Jawa Pos*, 13, 15, 17 19, 20, 21, 22, 23 Mei 1998.

Surat Kabar Harian *Kompas* 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Mei 1998

Surat Kabar *Merdeka*, 13, 15, 16, 20, 21 22, 24, 27 Mei 1998.

Surat Kabar *Suara Karya*, 14, 16, 19, 22 Mei 1998.

Hasil Laporan Penelitian dan Jurnal Penelitian

- Angga Adip Wahyu S. dan Dr. Aman, M.Pd. *Peranan Mahasiswa Yogyakarta Dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia (1998)*. Jurnal Risalah. Vol. 3 (6). (Online), (<http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/7345/26/769> Diakses tanggal 15 Februari 2016).
- Fuji Titulanita, Siti Sumardiati, Mrr. Ratna Endang W. 2015. *Kerusuhan Pasar Glodok: Studi Kasus Etnis Tionghoa di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat 1998-2000*. Jurnal Publika Budaya. Vol. 1 (3). (Online), (<http://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1533>, diakses 15 Februari 2016).
- Margaretha Pardede. *Aksi Mahasiswa IKIP Medan Menjelang Revolusi Mei 1998*. Jurnal Vol 1 No 1 (2013), (Online), (<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph/article/view/575/394>, Diakses tanggal 17 Februari 2016).
- Menteri Tenaga Kerja R.I. 1998. *Laporan Bidang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Nida Sylviani. 2011. *Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Dalam Pandangan Surat Kabar Kompas dan Republika di Jakarta*. Skripsi UPI. (Online), (<https://www.google.co.id/search?q=Peristiwa+Kerusuhan+Mei+1998+Dalam+Pandangan+Surat+Kabar+Kompas+dan+Republika+di+Jakarta&oeq=Peristiwa+Kerusuhan+Mei+1998+Dalam+Pandangan+Surat+Kabar+Kompas+dan+Republika+di+Jakarta&aqs=chrome..69i57j36l88j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>)
- Buku**
- Abdul Gafur. 2000. *Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Abdulrahman Surjomihardjo. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Aminudin Kasdi. 2001. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press.
- Amran Efendy. 1983. *Bunga Rampai Peranan Pers Indonesia Dalam Laju Pembangunan*. Medan: Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Karya Generasi Muda Indonesia.
- Anwar Arifin. 1992. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila: Suatu Kajian Pers Pancasila*. Jakarta: Media Sejahtera.
- A. Ariobimo Nusantara. 1998. *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*. Jakarta: Grasindo.
- Aspinal, Edward, dkk. 1999. *Titik Tolak Reformasi: Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LKiS.
- B.J.Habibie. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Bambang Trimansyah. 1998. *Para Tokoh di Balik Reformasi Episode Sang Oposan: Lokomotif itu Bernama Amien Rais*. Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia.
- Bantarto Bandoro (Ed.). 1994. *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Ester Indahyani Jusuf, dkk. 2007. *Kerusuhan Mei 1998: Fakta dan Analisa*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI).
- Fadli Zon. 2013. *Politik Huru Hara Mei 1998*. Jakarta: Fadli Zon Library.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Terjemahan Danang Kukuh Wardoyo dan Tim Cipinang. Penerbit: Institut Studi Arus Informasi.
- Hawe Setiawan, dkk. 1999. *Negeri Dalam Kobaran Api*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Helen Ishwara. 2001. *P.K. Ojong- Hidup Sederhana Berpikir Mulia*. Jakarta: Kompas.
- Helius Sjamsudin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hermawan Sulisty. 2002. *Lawan: Jejak-Jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: Pensil-324.
- Hidayat, Dedy N. dkk. 2000. *Pers dalam "Revolusi Mei", Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, David T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hiro Tugiman, 1999. *Budaya Jawa dan Mundurnya Presiden Soeharto*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iwan Gardono Sujatmiko. 1998. *Reformasi Politik dan Kedaulatan Rakyat*. Depok: Simposium Universitas Indonesia.
- Jakob Oetama. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- James Luhulima. 2001. *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*. Jakarta: Kompas.

- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara WacanaYogya.
- Kurniawan Junaedhie. 1991. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Marwati Djoened Poesponegoro (Ed.) dan Nugroho Notosusanto (Ed.). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohammad Hatta. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Muridan S. Widjojo, dkk. 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Octo Lampito. 1998. *Lengser Keprabon: Dokumen Reformasi*. Yogyakarta: Grafika WangsaBakti.
- Onong Uchjana Effendy. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purdey, Jemma. 2013. *Kekerasan Anti-Tionghoa di Indonesia 1996-1999*. Terjemahan Christine Susanna Tjhin. Denpasar: Pustaka Larasan.
- R. Moh Ali. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- S. Sinansari. 1998. *Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto: Reportasi Jurnalistik 72 Jam yang Menegangkan*. Bandung: Mizan.
- Senat Mahasiswa Universitas Trisakti. 1998. *Kronologi Peristiwa Selasa Berdarah 12 Mei 1998*.
- Simarmata, Salvatore. 2014. *Media & Politik : Sikap Pers Terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Smith, Edward C. 1986. *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafitipers.
- Soebagijo I.N. 1977. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Teguh Meinanda. 1981. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: ARMICO.
- Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). 2002. *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, Seri Dokumen Kunci.
- Tim Redaksi. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Tjipta Lesmana. 1985. *Dua Puluh Tahun Kompas: Profil Pers Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Erwin-Rika Press.
- Totok Djuroto. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Tribuana Said. 1998. *Sejarah Pers Nasional Dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Wishnu Basuki. 1995. *Pers dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.